



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/712/M.KT.03/2019 25 September 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tahun 2019

Yth.

(Daftar Terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2019 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka bersama ini kami sampaikan bahwa setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan evaluasi mandiri terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungannya masing-masing. Tujuan dari Kegiatan Evaluasi Mandiri SPBE adalah untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE di semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar menyampaikan Hasil Evaluasi Mandiri berikut bukti pendukungnya kepada Kementerian PANRB paling lambat tanggal 31 Oktober 2019. Ketentuan Umum Evaluasi Mandiri SPBE 2019 dapat dilihat pada lampiran II.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

SYAFRUDDIN

Lampiran I

Surat No. B/712/M.KT.03/2019

Tanggal: 25 September 2019

DAFTAR PENERIMA SURAT

Kementerian/Lembaga

Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Agama;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Menteri Kesehatan;
14. Menteri Sosial;
15. Menteri Ketenagakerjaan;
16. Menteri Perindustrian;
17. Menteri Perdagangan;
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Menteri Perhubungan;
21. Menteri Komunikasi dan Informatika;
22. Menteri Pertanian;
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Menteri Kelautan dan Perikanan;
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
30. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Menteri Pariwisata;
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Menteri Pemuda dan Olahraga;
34. Menteri Sekretariat Negara;
35. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
36. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
37. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
38. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
39. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
40. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
41. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
42. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;

43. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
44. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
45. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
46. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
47. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
48. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
49. Kepala Badan Pusat Statistik;
50. Kepala Badan Informasi Geospasial;
51. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
52. Kepala Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
53. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
54. Kepala Badan Narkotika Nasional;
55. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
56. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia;
57. Kepala Badan Keamanan Laut;
58. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
59. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
60. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
61. Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
62. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
63. Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat;
64. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
65. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
66. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
67. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
68. Jaksa Agung Republik Indonesia;
69. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
70. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
71. Sekretaris Kabinet;
72. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
73. Sekretaris Jenderal Komnas Hak Asasi Manusia;
74. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
75. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
76. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
77. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
78. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
79. Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;
80. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia;
81. Sekretaris Komisi Informasi Pusat;
82. Sekretaris Komisi Kejaksaan;
83. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional;
84. Ketua Badan Amil Zakat Nasional;
85. Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
86. Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional;
87. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
88. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden;
89. Direktur Radio Republik Indonesia;
90. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia;
91. Sekretaris Dewan Pers;
92. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
93. Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional.

DAFTAR PENERIMA SURAT

Kepolisian

Kepada Yth.

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Daerah Aceh;
3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
5. Kepala Kepolisian Daerah Riau;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
7. Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
8. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
9. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
10. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu;
11. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
12. Kepala Kepolisian Daerah DKI Jakarta;
13. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
14. Kepala Kepolisian Daerah Banten;
15. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
16. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur;
18. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
19. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
20. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
21. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
22. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
23. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;
24. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
25. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara;
26. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
27. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat
28. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
29. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;
30. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;
31. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo;
32. Kepala Kepolisian Daerah Maluku;
33. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara;
34. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat;
35. Kepala Kepolisian Daerah Papua;

DAFTAR PENERIMA SURAT

Provinsi

Kepada Yth.

1. Gubernur Aceh;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Gubernur Riau;
5. Gubernur Kepulauan Riau;
6. Gubernur Jambi;
7. Gubernur Sumatera Selatan;
8. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
9. Gubernur Bengkulu;
10. Gubernur Lampung;
11. Gubernur DKI Jakarta;
12. Gubernur Jawa Barat;
13. Gubernur Banten;
14. Gubernur Jawa Tengah;
15. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Gubernur Jawa Timur;
17. Gubernur Bali;
18. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
19. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
20. Gubernur Kalimantan Barat
21. Gubernur Kalimantan Tengah;
22. Gubernur Kalimantan Selatan;
23. Gubernur Kalimantan Timur;
24. Gubernur Kalimantan Utara;
25. Gubernur Sulawesi Utara;
26. Gubernur Sulawesi Barat
27. Gubernur Sulawesi Tengah;
28. Gubernur Sulawesi Tenggara;
29. Gubernur Sulawesi Selatan;
30. Gubernur Gorontalo;
31. Gubernur Maluku;
32. Gubernur Maluku Utara;
33. Gubernur Papua Barat;
34. Gubernur Papua;

DAFTAR PENERIMA SURAT

Kabupaten/Kota

Kepada Yth.

1. Bupati Aceh Barat;
2. Bupati Aceh Barat Daya;
3. Bupati Aceh Besar;
4. Bupati Aceh Jaya;
5. Bupati Aceh Selatan;
6. Bupati Aceh Singkil;
7. Bupati Aceh Tamiang;
8. Bupati Aceh Tengah;
9. Bupati Aceh Tenggara;
10. Bupati Aceh Timur;
11. Bupati Aceh Utara;
12. Bupati Agam;
13. Bupati Alor;
14. Bupati Asahan;
15. Bupati Asmat;
16. Bupati Badung;
17. Bupati Balangan;
18. Bupati Bandung;
19. Bupati Bandung Barat;
20. Bupati Banggai;
21. Bupati Banggai Kepulauan;
22. Bupati Banggai Laut;
23. Bupati Bangka;
24. Bupati Bangka Barat;
25. Bupati Bangka Selatan;
26. Bupati Bangka Tengah;
27. Bupati Bangkalan;
28. Bupati Bangli;
29. Bupati Banjar;
30. Bupati Banjarnegara;
31. Bupati Bantaeng;
32. Bupati Bantul;
33. Bupati Banyuasin;
34. Bupati Banyumas;
35. Bupati Banyuwangi;
36. Bupati Barito Kuala;
37. Bupati Barito Selatan;
38. Bupati Barito Timur;
39. Bupati Barito Utara;
40. Bupati Barru;
41. Bupati Batang;
42. Bupati Batanghari;
43. Bupati Batu Bara;
44. Bupati Bekasi;
45. Bupati Belitung;
46. Bupati Belitung Timur;
47. Bupati Belu;
48. Bupati Bener Meriah;
49. Bupati Bengkulu;
50. Bupati Bengkulu Selatan;
51. Bupati Bengkulu Selatan;

52. Bupati Bengkulu Tengah;
53. Bupati Bengkulu Utara;
54. Bupati Berau;
55. Bupati Biak Numfor;
56. Bupati Bima;
57. Bupati Bireuen;
58. Bupati Blitar;
59. Bupati Blora;
60. Bupati Boalemo;
61. Bupati Bogor;
62. Bupati Bojonegoro;
63. Bupati Bolaang Mongondow;
64. Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
65. Bupati Bolaang Mongondow Timur;
66. Bupati Bolaang Mongondow Utara;
67. Bupati Bombana;
68. Bupati Bondowoso;
69. Bupati Bone;
70. Bupati Bone Bolango;
71. Bupati Boven Digoel;
72. Bupati Boyolali;
73. Bupati Brebes;
74. Bupati Buleleng;
75. Bupati Bulukumba;
76. Bupati Bulungan;
77. Bupati Bungo;
78. Bupati Buol;
79. Bupati Buru;
80. Bupati Buru Selatan;
81. Bupati Buton;
82. Bupati Buton Selatan;
83. Bupati Buton Tengah;
84. Bupati Buton Utara;
85. Bupati Ciamis;
86. Bupati Cianjur;
87. Bupati Cilacap;
88. Bupati Cirebon;
89. Bupati Dairi;
90. Bupati Deiyai;
91. Bupati Deli Serdang;
92. Bupati Demak;
93. Bupati Dharmasraya;
94. Bupati Dogiyai;
95. Bupati Dompu;
96. Bupati Donggala;
97. Bupati Empat Lawang;
98. Bupati Ende;
99. Bupati Enrekang;
100. Bupati Fakfak;
101. Bupati Flores Timur;
102. Bupati Garut;
103. Bupati Gayo Lues;
104. Bupati Gianyar;
105. Bupati Gorontalo;
106. Bupati Gorontalo Utara;
107. Bupati Gowa;

108. Bupati Gresik;
109. Bupati Grobogan;
110. Bupati Gunung Kidul;
111. Bupati Gunung Mas;
112. Bupati Halmahera Barat;
113. Bupati Halmahera Selatan;
114. Bupati Halmahera Tengah;
115. Bupati Halmahera Timur;
116. Bupati Halmahera Utara;
117. Bupati Hulu Sungai Selatan;
118. Bupati Hulu Sungai Tengah;
119. Bupati Hulu Sungai Utara;
120. Bupati Humbang Hasundutan;
121. Bupati Indragiri Hilir;
122. Bupati Indragiri Hulu;
123. Bupati Indramayu;
124. Bupati Intan Jaya;
125. Bupati Jayapura;
126. Bupati Jayawijaya;
127. Bupati Jember;
128. Bupati Jembrana;
129. Bupati Jeneponto;
130. Bupati Jepara;
131. Bupati Jombang;
132. Bupati Kaimana;
133. Bupati Kampar;
134. Bupati Kapuas;
135. Bupati Kapuas Hulu;
136. Bupati Karanganyar;
137. Bupati Karangasem;
138. Bupati Karawang;
139. Bupati Karimun;
140. Bupati Karo;
141. Bupati Katingan;
142. Bupati Kaur;
143. Bupati Kayong Utara;
144. Bupati Kebumen;
145. Bupati Kediri;
146. Bupati Keerom;
147. Bupati Kendal;
148. Bupati Kepahiang;
149. Bupati Kepulauan Anambas;
150. Bupati Kepulauan Aru;
151. Bupati Kepulauan Bintan;
152. Bupati Kepulauan Mentawai;
153. Bupati Kepulauan Meranti;
154. Bupati Kepulauan Sangihe;
155. Bupati Kepulauan Selayar;
156. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
157. Bupati Kepulauan Sula;
158. Bupati Kepulauan Talaud;
159. Bupati Kepulauan Yapen;
160. Bupati Kerinci;
161. Bupati Ketapang;
162. Bupati Klaten;
163. Bupati Klungkung;

164. Bupati Kolaka;
165. Bupati Kolaka Timur;
166. Bupati Kolaka Utara;
167. Bupati Konawe;
168. Bupati Konawe Kepulauan;
169. Bupati Konawe Selatan;
170. Bupati Konawe Utara;
171. Bupati Kotabaru;
172. Bupati Kotawaringin Barat;
173. Bupati Kotawaringin Timur;
174. Bupati Kuantan Singingi;
175. Bupati Kubu Raya;
176. Bupati Kudus;
177. Bupati Kulon Progo;
178. Bupati Kuningan;
179. Bupati Kupang;
180. Bupati Kutai Barat;
181. Bupati Kutai Kartanegara;
182. Bupati Kutai Timur;
183. Bupati Labuhanbatu;
184. Bupati Labuhanbatu Selatan;
185. Bupati Labuhanbatu Utara;
186. Bupati Lahat;
187. Bupati Lamandau;
188. Bupati Lamongan;
189. Bupati Lampung Barat;
190. Bupati Lampung Selatan;
191. Bupati Lampung Tengah;
192. Bupati Lampung Timur;
193. Bupati Lampung Utara;
194. Bupati Landak;
195. Bupati Langkat;
196. Bupati Lanny Jaya;
197. Bupati Lebak;
198. Bupati Lebong;
199. Bupati Lembata;
200. Bupati Lima Puluh Kota;
201. Bupati Lingga;
202. Bupati Lombok Barat;
203. Bupati Lombok Tengah;
204. Bupati Lombok Timur;
205. Bupati Lombok Utara;
206. Bupati Lumajang;
207. Bupati Luwu;
208. Bupati Luwu Timur;
209. Bupati Luwu Utara;
210. Bupati Madiun;
211. Bupati Magelang;
212. Bupati Magetan;
213. Bupati Mahakam Ulu;
214. Bupati Majalengka;
215. Bupati Majene;
216. Bupati Malaka;
217. Bupati Malang;
218. Bupati Malinau;
219. Bupati Maluku Barat Daya;

220. Bupati Maluku Tengah;
221. Bupati Maluku Tenggara;
222. Bupati Maluku Tenggara Barat;
223. Bupati Mamasa;
224. Bupati Mamberamo Raya;
225. Bupati Mamberamo Tengah;
226. Bupati Mamuju;
227. Bupati Mamuju Tengah;
228. Bupati Mandailing Natal;
229. Bupati Manggarai;
230. Bupati Manggarai Barat;
231. Bupati Manggarai Timur;
232. Bupati Manokwari;
233. Bupati Manokwari Selatan;
234. Bupati Mappi;
235. Bupati Maros;
236. Bupati Maybrat;
237. Bupati Melawi;
238. Bupati Mempawah;
239. Bupati Merangin;
240. Bupati Merauke;
241. Bupati Mesuji;
242. Bupati Mimika;
243. Bupati Minahasa;
244. Bupati Minahasa Selatan;
245. Bupati Minahasa Tenggara;
246. Bupati Minahasa Utara;
247. Bupati Mojokerto;
248. Bupati Morowali;
249. Bupati Morowali Utara;
250. Bupati Muara Enim;
251. Bupati Muaro Jambi;
252. Bupati Mukomuko;
253. Bupati Muna;
254. Bupati Muna Barat;
255. Bupati Murung Raya;
256. Bupati Musi Banyuasin;
257. Bupati Musi Rawas;
258. Bupati Musi Rawas Utara;
259. Bupati Nabire;
260. Bupati Nagan Raya;
261. Bupati Nagekeo;
262. Bupati Natuna;
263. Bupati Nduga;
264. Bupati Ngada;
265. Bupati Nganjuk;
266. Bupati Ngawi;
267. Bupati Nias;
268. Bupati Nias Barat;
269. Bupati Nias Selatan;
270. Bupati Nias Utara;
271. Bupati Nunukan;
272. Bupati Ogan Ilir;
273. Bupati Ogan Komering Ilir;
274. Bupati Ogan Komering Ulu;
275. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

276. Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
277. Bupati Pacitan;
278. Bupati Padang Lawas;
279. Bupati Padang Lawas Utara;
280. Bupati Padang Pariaman;
281. Bupati Pakpak Bharat;
282. Bupati Pamekasan;
283. Bupati Pandeglang;
284. Bupati Pangandaran;
285. Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
286. Bupati Paniai;
287. Bupati Parigi Moutong;
288. Bupati Pasaman;
289. Bupati Pasaman Barat;
290. Bupati Pasangkayu;
291. Bupati Paser;
292. Bupati Pasuruan;
293. Bupati Pati;
294. Bupati Pegunungan Arfak;
295. Bupati Pegunungan Bintang;
296. Bupati Pekalongan;
297. Bupati Pelalawan;
298. Bupati Pematang;
299. Bupati Penajam Paser Utara;
300. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
301. Bupati Pesawaran;
302. Bupati Pesisir Barat;
303. Bupati Pesisir Selatan;
304. Bupati Pidie;
305. Bupati Pidie Jaya;
306. Bupati Pinrang;
307. Bupati Pohuwato;
308. Bupati Polewali Mandar;
309. Bupati Ponorogo;
310. Bupati Poso;
311. Bupati Pringsewu;
312. Bupati Probolinggo;
313. Bupati Pulang Pisau;
314. Bupati Pulau Morotai;
315. Bupati Pulau Taliabu;
316. Bupati Puncak;
317. Bupati Puncak Jaya;
318. Bupati Purbalingga;
319. Bupati Purwakarta;
320. Bupati Purworejo;
321. Bupati Raja Ampat;
322. Bupati Rejang Lebong;
323. Bupati Rembang;
324. Bupati Rokan Hilir;
325. Bupati Rokan Hulu;
326. Bupati Rote Ndao;
327. Bupati Sabu Raijua;
328. Bupati Sambas;
329. Bupati Samosir;
330. Bupati Sampang;
331. Bupati Sanggau;

332. Bupati Sarmi;
333. Bupati Sarolangun;
334. Bupati Sekadau;
335. Bupati Seluma;
336. Bupati Semarang;
337. Bupati Seram Bagian Barat;
338. Bupati Seram Bagian Timur;
339. Bupati Serang;
340. Bupati Serdang Bedagai;
341. Bupati Seruyan;
342. Bupati Siak;
343. Bupati Sidenreng Rappang;
344. Bupati Sidoarjo;
345. Bupati Sigi;
346. Bupati Sijunjung;
347. Bupati Sikka;
348. Bupati Simalungun;
349. Bupati Simeulue;
350. Bupati Sinjai;
351. Bupati Sintang;
352. Bupati Situbondo;
353. Bupati Sleman;
354. Bupati Solok;
355. Bupati Solok Selatan;
356. Bupati Soppeng;
357. Bupati Sorong;
358. Bupati Sorong Selatan;
359. Bupati Sragen;
360. Bupati Subang;
361. Bupati Sukabumi;
362. Bupati Sukamara;
363. Bupati Sukoharjo;
364. Bupati Sumba Barat;
365. Bupati Sumba Barat Daya;
366. Bupati Sumba Tengah;
367. Bupati Sumba Timur;
368. Bupati Sumbawa;
369. Bupati Sumbawa Barat;
370. Bupati Sumedang;
371. Bupati Sumenep;
372. Bupati Supiori;
373. Bupati Tabalong;
374. Bupati Tabanan;
375. Bupati Takalar;
376. Bupati Tambrauw ;
377. Bupati Tana Tidung;
378. Bupati Tana Toraja;
379. Bupati Tanah Bumbu;
380. Bupati Tanah Datar;
381. Bupati Tanah Laut;
382. Bupati Tangerang;
383. Bupati Tanggamus;
384. Bupati Tanjung Jabung Barat;
385. Bupati Tanjung Jabung Timur;
386. Bupati Tapanuli Selatan;
387. Bupati Tapanuli Tengah;

388. Bupati Tapanuli Utara;
389. Bupati Tapin;
390. Bupati Tasikmalaya;
391. Bupati Tebo;
392. Bupati Tegal;
393. Bupati Teluk Bintuni;
394. Bupati Teluk Wondama;
395. Bupati Temanggung;
396. Bupati Timor Tengah Selatan;
397. Bupati Timor Tengah Utara;
398. Bupati Toba Samosir;
399. Bupati Tojo Una-Una;
400. Bupati Tolikara;
401. Bupati Tolitoli;
402. Bupati Toraja Utara;
403. Bupati Trenggalek;
404. Bupati Tuban;
405. Bupati Tulang Bawang;
406. Bupati Tulang Bawang Barat;
407. Bupati Tulungagung;
408. Bupati Wajo;
409. Bupati Wakatobi;
410. Bupati Waropen;
411. Bupati Way Kanan;
412. Bupati Wonogiri;
413. Bupati Wonosobo;
414. Bupati Yahukimo;
415. Bupati Yalimo;
416. Walikota Ambon;
417. Walikota Balikpapan;
418. Walikota Banda Aceh;
419. Walikota Bandar Lampung;
420. Walikota Bandung;
421. Walikota Banjar;
422. Walikota Banjarbaru;
423. Walikota Banjarmasin;
424. Walikota Batam;
425. Walikota Batu;
426. Walikota Baubau;
427. Walikota Bekasi;
428. Walikota Bengkulu;
429. Walikota Bima;
430. Walikota Binjai;
431. Walikota Bitung;
432. Walikota Blitar;
433. Walikota Bogor;
434. Walikota Bontang;
435. Walikota Bukittinggi;
436. Walikota Cilegon;
437. Walikota Cimahi;
438. Walikota Cirebon;
439. Walikota Denpasar;
440. Walikota Depok;
441. Walikota Dumai;
442. Walikota Gorontalo;
443. Walikota Gunungsitoli;

444. Walikota Jambi;
445. Walikota Jayapura;
446. Walikota Kediri;
447. Walikota Kendari;
448. Walikota Kotamobagu;
449. Walikota Kupang;
450. Walikota Langsa;
451. Walikota Lhokseumawe;
452. Walikota Lubuklinggau;
453. Walikota Madiun;
454. Walikota Magelang;
455. Walikota Makassar;
456. Walikota Malang;
457. Walikota Manado;
458. Walikota Mataram;
459. Walikota Medan;
460. Walikota Metro;
461. Walikota Mojokerto;
462. Walikota Padang;
463. Walikota Padang Panjang;
464. Walikota Padangsidempuan;
465. Walikota Pagar Alam;
466. Walikota Palangka Raya;
467. Walikota Palembang;
468. Walikota Palopo;
469. Walikota Palu;
470. Walikota Pangkal Pinang;
471. Walikota Parepare;
472. Walikota Pariaman;
473. Walikota Pasuruan;
474. Walikota Payakumbuh;
475. Walikota Pekalongan;
476. Walikota Pekanbaru;
477. Walikota Pematangsiantar;
478. Walikota Pontianak;
479. Walikota Prabumulih;
480. Walikota Probolinggo;
481. Walikota Sabang;
482. Walikota Salatiga;
483. Walikota Samarinda;
484. Walikota Sawahlunto;
485. Walikota Semarang;
486. Walikota Serang;
487. Walikota Sibolga;
488. Walikota Singkawang;
489. Walikota Solok;
490. Walikota Sorong;
491. Walikota Subulussalam;
492. Walikota Sukabumi;
493. Walikota Sungai Penuh;
494. Walikota Surabaya;
495. Walikota Surakarta;
496. Walikota Tangerang;
497. Walikota Tangerang Selatan;
498. Walikota Tanjungbalai;
499. Walikota Tanjungpinang;

500.Walikota Tarakan;
501.Walikota Tasikmalaya;
502.Walikota Tebing Tinggi;
503.Walikota Tegal;
504.Walikota Ternate;
505.Walikota Tidore Kepulauan;
506.Walikota Tomohon;
507.Walikota Tual;
508.Walikota Yogyakarta.

Lampiran II

Surat No. B/712/M.KT.03/2019

Tanggal: 25 September 2019

KETENTUAN UMUM EVALUASI MANDIRI SPBE 2019

1. Jadwal Pelaksanaan : 1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019
2. Batas Waktu Pengumpulan : 31 Oktober 2019
3. Pelaksana : Tim Evaluator Internal Instansi
4. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SPBE 2019 adalah dengan mengisi indikator-indikator pada Kuisisioner Tingkat Kematangan seperti yang dijelaskan pada Kegiatan Asistensi dan Piloting SPBE 2019. Jika butuh penjelasan lebih lanjut, mekanisme umum dan Buku Pedoman Evaluasi juga dapat dilihat pada website <http://spbe.go.id/evaluasi>.
5. Upload Dokumen

Nama Instansi : (Nama Instansi)
Kelompok : (Kelompok Instansi)
URL : (URL Sanapati)
Username : (Username)
Password : (Password)

6. Upload dokumen bukti dukung Evaluasi Mandiri dilakukan dengan mengunjungi website tersebut yang disesuaikan dengan kelompok evaluasinya masing-masing dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan. Dokumen Pedoman Penggunaan Aplikasi Sanapati juga dapat diunduh pada website <http://spbe.go.id/evaluasi>.
7. Hasil dari Evaluasi Mandiri SPBE 2019 dari instansi masing-masing kemudian akan dinilai oleh Tim Evaluator Eksternal yang pada akhirnya nanti akan digunakan sebagai Nilai Indeks SPBE Tahun 2019.
8. Mohon untuk dapat mengisi Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Hasil Evaluasi Mandiri Tahun 2019 yang terlampir dan mengunggah hasil pindai (*scan*) dokumen yang telah dicap dan ditandatangani dengan format *.pdf* ke Aplikasi Sanapati dengan judul dokumen : Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Hasil Evaluasi Mandiri Tahun 2019 + (Nama Instansi).
9. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi Mandiri SPBE 2019 harap dapat menghubungi email asdep2balaks@menpan.go.id atau Sigit Supriyanto (+62811-9770-957), Joshua Ariel (+62856-5101-5615), dan Nugroho Arief (+62822-4919-0828).